Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

PARTISIPASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN DI KALIMANTAN

Shenny Des Jouanka¹, Gisela Kessik², Santoso Tri Raharjo³, Nurliana C. Apsari⁴, Maulana Irfan⁵

^{1, 2} Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

^{3, 4, 5} Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial & Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran

(shennyjovs25@gmail.com; giselakessik42@gmail.com; santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id; nurliana.cipta.apsari@unpad.ac.id; maulana.irfan@unpad.ac.id)

Abstrak

Infrastruktur menjadi salah satu prioritas kinerja pemerintah Indonesia saat ini. Namun, dalam pelaksanaannya pembangunan infrastruktur belum merata dikarenakan beban ekonomi dan sosial di berbagai daerah yang ditanggung pemerintah masih sangat besar. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sejumlah 4.796 triliun rupiah diperlukan untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2019. Namun, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memberikan kontribusi 41% dari total pembiayaan. Salah satu bidang infrastruktur yang masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas adalah bidang kesehatan. Infrastruktur kesehatan masih perlu ditingkatkan terutama bagi daerah di luar di pulau Jawa, salah satunya Kalimantan. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2018 menyatakan jumlah infrastruktur kesehatan salah satunya Puskesmas, paling sedikit di Indonesia berada di provinsi Kalimantan Utara dengan total jumlah 56 puskesmas. Oleh karena itu, didukung dengan banyaknya perusahaan pada pulau Kalimantan, partisipasi perusahaan-perusahaan pemerintah maupun non-pemerintah diperlukan untuk membantu persebaran pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan yang direalisasikan melalui program CSR. Tulisan mendeskripsikan partisipasi perusahaan-perusahaan melalui kegiatan CSR dalam membantu pembangunan infrastruktur kesehatan di Kalimantan, serta bagaimana pekerja sosial industri dapat berperan dalam kegiatan CSR tersebut..

Kata-kata kunci: partisipasi, Infrastruktur, kesehatan, CSR, Pekerja Sosial Industri

Abstract

Infrastructure has become one of current priority of Indonesian's government. However, the implementation of infrastructure development have not been equally spread across the country because of the huge economic and social burden in various region that the government endure. According to the National Medium Term Development Plan of 2015-2019, 4.796 trillion rupiahs is needed to fulfill the infrastructure development goals that has been settled by the government in 2019. However, the central dan local government can only contribute 41% from the total cost. One of the fields of infrastructure development that is still need enhancement is health care and services infrastructure. Health infrastructure still needs to be improved, especially for areas outside Java, one of which is Kalimantan. The Indonesian Ministry of Health Data and Information Center in 2018 stated that the number of health infrastructure such as puskesmas in North Kalimantan province only amounted to 56 puskesmas. This number is the least compared to other regions. Therefore, the participation of governmental and non-governmental companies is required in order to help reach the health care and services infrastructure developmental goals that is implemented by CSR programs. This article will describes the companies' participation through CSR activities on helping the development of health care and services infrastructure in Kalimantan.

Keywords: *participation, health, CSR, social work industry.*

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas kinerja pemerintah Indonesia pada saat ini. Selain merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi perkembangan ekonomi, kualitas dan kuantitas infrastruktur juga berperan dalam memastikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam (Rioja, 2001) disebutkan bahwa infrastruktur dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap *output*, investasi pribadi dan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan yang baik dalam mendasari pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurut data dari *Global Competitiveness Report* tahun 2015-2016 oleh *World Economic Forum* (WEF), Indonesia berada pada urutan ke-62 dari 140 negara dalam aspek pembangunan infrastruktur. Urutan ini tergolong cukup standar, namun masih ada ruang yang luas untuk peningkatan. Salah satu bidang pembangunan infrastruktur yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur kesehatan. Todaro (2002) dalam Pohan & Halim (2013) menyebutkan bahwa kesehatan, pada dasarnya adalah salah satu aspek yang menentukan tingkat dari standar kehidupan seorang individu. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara berkembang yang masih terus melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, perlu memerhatikan kuantitas, kualitas dan persebaran pembangunan infrastruktur atau fasilitas kesehatan.

Faktanya, persebaran pembangunan infrastruktur bidang kesehatan di Indonesia masih belum merata di berbagai daerah. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, menyebutkan dari total 9.993 jumlah puskesmas yang ada di seluruh Indonesia, provinsi yang memiliki fasilitas puskesmas terbanyak adalah provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi yakni Jawa Barat, dengan jumlah puskesmas mencapai 1.069, sedangkan jumlah puskesmas paling sedikit berada di provinsi Kalimantan Utara dengan

total jumlah 56 puskesmas. Putri (2019) menyebutkan, data tersebut menunjukkan bahwa persebaran fasilitas kesehatan secara umum masih lebih banyak tersedia di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan, daerah-daerah di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua masih tergolong minim akan fasilitas kesehatan sehingga secara otomatis tingkat kesehatan di area-area tersebut tergolong cukup rendah. Dalam artikel ini, pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur kesehatan akan difokuskan pada wilayah Kalimantan.

Selain kuantitas atau jumlah dari fasilitas kesehatan yang masih terbilang kurang memadai, kualitas dari fasilitas kesehatan yang sudah ada pun masih belum maksimal. Menurut data Pusdatin Kementerian Kesehatan tahun 2018, persentase jumlah puskesmas yang sudah memberikan pelayanan sesuai standar paling tinggi untuk wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Selatan dengan persentase 62,23%, kemudian diikuti oleh Kalimantan Timur dengan persentase 52,46%, Kalimantan Utara dengan persentase 35,71%, Kalimantan Barat dengan persentase 33,20%, dan Kalimantan Tengah dengan persentase terendah yakni 30,50%. Selain puskesmas, jumlah fasilitas kesehatan lain seperti Klinik dan Rumah Sakit juga masih belum maksimal. Jumlah klinik utama terbanyak di wilayah Kalimantan dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah 14 klinik, kemudian diikuti oleh Kalimantan Barat dengan jumlah 8 klinik, Kalimantan Timur dan Selatan dengan jumlah 6 klinik, sedangkan Kalimantan Utara belum memiliki klinik. Untuk Rumah Sakit dalam data profil kesehatan Indonesia tahun 2018, di wilayah Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan memiliki capaian persentase akreditasi Rumah Sakit tertinggi dengan jumlah persentase 79,55%, diikuti oleh Kalimantan Tengah dengan jumlah persentase 69,23%, Kalimantan Timur dengan jumlah persentase 68,52%, Kalimantan Barat dengan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

64,58%, dan Kalimantan Utara kembali menduduki peringkat terendah tidak hanya di wilayah Kalimantan, namun terendah di seluruh Indonesia dengan jumlah persentase 40%. Dilihat dari angka-angka ini, dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas fasilitas infrastruktur kesehatan di Kalimantan masih memerlukan peningkatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu contoh kasus akibat dari minimnya fasilitas kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara adalah warga di Pulau Sebatik yang lebih memilih untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia karena fasilitas yang disediakan lebih memadai dan akses untuk mencapai rumah sakit pun lebih mudah dijangkau dibandingkan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan.

Profil Kesehatan Indonesia tahun 2018 tidak memuat data mengenai jumlah fasilitas kesehatan menurut penyelenggara dan provinsi. Namun, data tersebut dijabarkan pada dokumen Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017. Menurut data pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 tersebut, jumlah Rumah Sakit di hampir seluruh provinsi di wilayah Kalimantan didominasi oleh Rumah Sakit milik swasta, kecuali provinsi Kalimantan Tengah yang jumlah RS terbanyak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten sedangkan untuk data RS milik BUMN disatukan dengan RS milik Kementerian diluar Kementerian Kesehatan sehingga tidak diketahui pasti jumlah RS yang diselenggarakan oleh BUMN. Namun, dari angka keseluruhan total RS dari penyelenggara Kementerian di luar Kementerian Kesehatan dan BUMN tersebut masih tergolong sangat sedikit. Walaupun, beberapa Rumah Sakit milik swasta di wilayah Kalimantan tersebut belum semuanya terakreditasi, data ini menunjukkan bahwa kontribusi pihak di luar pemerintah cukup besar dalam pengembangan pembangunan infrastruktur kesehatan di Kalimantan. Secara umum, perusahaan-perusahaan memberikan kontribusi dalam segala bidang kepada masyarakat melalui program dari bagian CSR perusahaan tersebut.

CSR sendiri dapat didefinisikan mulai dari sebagai program filantropis, sistem manajemen internal, dan akhirnya salah satu bentuk regulasi perusahaan (Sheehy, 2012). Dalam praktiknya, CSR sudah cukup dikenal di Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan, mengingat banyaknya berbagai jenis perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dan peraturan mengharuskan perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan program-program CSR untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, salah satunya dalam bidang kesehatan. Salah satu contoh spesifiknya adalah perusahaan tambang multinasional Berau Coal yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membangun Rumah Sehat BAZNAS-Berau Coal di Kalimantan Timur. Selain itu, CSR Berau Coal di bidang kesehatan juga menyelenggarakan program untuk mencegah gizi buruk, pengendalian penyakit endemik, demam berdarah, kemudian pelayanan dan pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat lingkaran tambang yang mengalami kesulitan akses untuk mencapai puskesmas, dan juga penyediaan fasilitas kesehatan untuk puskesmas dan posyandu (Mildiana, 2012). Contoh-contoh lainnya akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

KAJIAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam konsep Profit, People, Planet.

Corporate sosial responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban yang saat ini dilakukan dalam suatu satuan unit di dalam perusahaan. Tanggung jawab ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka munculnya kesadaran bahwa di dalam dunia usaha atau bisnis, pengusaha juga harus memperhatikan lingkungan tempat adanya usaha karena usaha dan sistem di sekelilingnya terkhusus masyarakat. Kesadaran akan harus terlaksananya kegiatan CSR oleh perusahaan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

khususnya untuk masyarakat dan lingkungan adalah karena konsep yang dikemukakan oleh Elkington (dalam Rosyida, 2011) mengenai 3P yaitu profit, people, dan planet. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan di dalam bisnisnya selain mengejar profit juga harus sadar untuk memberikan kontribusi positif untuk masyarakat di sekitar dan lingkungan agar alam tetap lestari dan masyarakat dapat hidup sejahtera. Hal ini membangun simbiosis mutualisme yang berdampak pula pada ekosistem bisnis perusahaan. CSR berperan sebagai bentuk dalam mewujudkan *good corporate governance, good corporate citizenship dan good business ethics* dari sebuah entitas bisnis. (Rosyida, 2011; Mapisangka, 2009).

Berdasarkan Pradini, Siti & Irfan (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada saat ini pula di Indonesia konsep dan tanggung jawab sosial perusahaan telah populer dan telah banyak perusahaan yang menjalankan pendekatan dan program CSR yang dimiliki perusahaannya masing-masing. Di Indonesia terkhusus perusahaan telah mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan CSR yang disahkan dalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Dalam aturannya ditetapkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Suharto, 2010). Kemudian peraturan tersebut kembali ditambahkan dalam tahun 2012 melalui peraturan pemerintah No. 47 dimana dikatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas adalah melanjutkan komitmen sebagai bisnis untuk bersikap secara etnis, bermoral dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan dan tenaga kerja dan keluarganya maupun komunitas lokal dan masyarakat (Murni, Amin, & Jamal, 2015). Selain perusahaan swasta, perusahaan milik pemerintah atau BUMN juga diterapkan peraturan yang lebih mengikatnya dalam

melaksanakan CSR yaitu mengikuti peraturan yang diterapkan oleh undang-undang dan juga kementerian BUMN seperti pada Pasal 74 UU PT yang berpedoman pada peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007, sampai adanya penetapan lebih lanjut dari Menteri Negara BUMN (Risa, Sulastri, & Pramono, 2011), 2011).

Banyak ahli yang menyampaikan pengertiannya mengenai konsep dari CSR. Salah satunya Untung (dalam Murni, Amin & Jamal 2015) yang menyatakan CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Hal ini seiring dengan yang dikatakan oleh Nuryana (dalam Pradini, Siti & Irfan, 2015) bahwa CSR secara konseptual memadukan kepedulian sosial di dalam kerangka bisnis sehingga interaksi terjadi antara perusahaan dan *stakeholder* dalam hal ini masyarakat berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Konsep *corporate social responsibility* (CSR) menurut Bank Dunia ialah suatu komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang terkait dengan perbaikan hidup dengan cara yang baik bagi kepentingan bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan, serta kepada masyarakat sekitarnya (Kiroyan, dalam Aryawan, Wahyuda & Ekawati, 2017). CSR memang secara tidak langsung membantu beban pemerintah dalam membantu memberikan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang mungkin belum terjangkau oleh pemerintah. Semangat dan kontribusi ini dilakukan oleh perusahaan dengan model-model pendekatan CSR yang dimilikinya masing-masing. Pembangunan yang sering dilakukan seperti pembangunan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan peningkatan kompetensi, keamanan lingkungan, kesehatan, pendidikan dan sector pembangunan dasar lainnya (Murni, Amin & Jamal, 2015; Asyari, 2009).

Di dalam pelaksanaan CSR di antaranya terdapat beberapa model yang dapat diterapkan. Menurut Saidi dan Abidin (2004, dalam Suharto 2006) model-model tersebut meliputi:

- a. Keterlibatan langsung. Hal ini dimaksudkan dengan perusahaan menyelenggarakan kegiatan sosial atau memberikan hibah atau sumbangan langsung kepada masyarakat tanpa adanya perantara.
- b. Melalui Yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan yang menjadi sumber pelaksanaan CSR perusahaan. Sehingga pendanaan dan fokus CSR berlangsung secara kontinu dan dimonitoring secara berkelanjutan.
- c. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan bekerja sam adengan lembaga sosial atau lembaga non pemerintah ataupun instansi pendidikan untuk melaksanakan kegiatan sosialnya.
- d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan mendirikan atau menjadi anggota suatu lembaga sosial. Pola ini berorientasi pada hibah perusahaan yang bersifat "hibah pembangunan".

Dalam praktiknya, bisa saja terjadi suatu perusahaan terlibat kegiatan CSR dengan menerapkan keseluruhan model tersebut, atau hanya sebagian saja. Pelaksanaan CSR suatu perusahaan amat bergantung pada jenis dan karakteristik perusahaan, serta sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Pekerja sosial adalah orang yang memiliki kewenangan dan juga keahlian dalam menyelenggarakan pelayanan sosial (Wibhawa, dkk, 2019). Fokus utama dari pekerja sosial adalah pada perbaikan dan peningkatan keberfungsian sosial dari manusia, keluarga, kelompok, atau suatu komunitas melalui *treatment* sosial tertentu. Dengan mengacu pada konsep umum tersebut, maka peran pekerjaan sosial industri (PSI) adalah bidang praktik pekerjaan sosial yang secara khusus menangani kebutuhan kemanusiaan dan sosial di lingkungan kerja dengan intervensi dan metode pertolongan (Suharto, 2006); serta lingkungan sosial dan sekitar industri yang menunjang relasi harmonis diantara kedua pihak (Raharjo, 2015).

Di dalam melihat peran pekerja sosial Industri khususnya di bidang program yang berdampak untuk masyarakat atau tergabung didalam CSR dapat dilihat melalui tipologi model seting PSI (Straussner, dalam Suharto, 2006):

- a. Model pelayanan bagi pegawai: pekerja sosial dapat menjadi konselor, konfrontator konstruktif, broker, pembela, mediator, pendidik atau pelatih.
- b. Model pelayanan bagi Organisasi Perusahaan: pekerja sosial dapat menjadi konsultan, analisis atau evaluator, pelatih, dan pengembang program.
- c. Model pelayanan bagi konsumen: pekerja sosial memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan konsumen.
- d. Model tanggung jawab sosial perusahaan: pekerja sosial mengidentifikasi dan membuat komitmen usaha peningkatan standar hidup untuk masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana dan analis kemasyarakatan, pengatur

Peran Pekerja Sosial Industri

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

anggaran, pengembang program, beroker, pembela, dan negosiator.

- e. Model kebijakan public di bidang kepegawaian: model ini mencakup formulasi, identifikasi, analisis, advokasi bagi kebijakan, serta program-program. Pekerja sosial berperan sebagai analis kebijakan, pengembang kebijakna, dan advokat kebijakan.

Sedangkan pekerja sosial industri yang bergerak pada sisi eksternal perusahaan, umumnya bergerak dalam upaya membangun dan meningkatkan keberfungsian masyarakat sekitar industri atau mesyarakat yang bergerak dalam bidang industri, baik industri rumah tangga, industri kecil atau industri menengah. Biasanya pekerja sosial bekerja dengan latar suatu lembaga pelayanan sosial yang *consent* terhadap peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta sikap-sikap para pelaku usaha, khususnya industri mikro, kecil dan menengah (Raharjo, ST., 2019). Pekerja sosial industri dapat pula membantu dan bermitra dengan industri besar yang peduli terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar industri besar tersebut, atau masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan.

PEMBAHASAN

CSR untuk Infrastruktur Kesehatan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan unit yang melakukan program atau kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan dengan konsepnya yaitu *profit, people, planet*. Oleh karena itu CSR melakukan intervensi baik internal dan eksternal. Awalnya CSR adalah kegiatan filantropi dari pengusaha secara sukarela namun pada saat ini perusahaan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam diharuskan melakukan kegiatan CSR eksternal atau untuk masyarakat yang dalam peraturannya minimal

berasal dari 1% dana laba yang didapatkan perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan CSR perusahaan memiliki kebebasan untuk melihat sektor yang dapat diintervensi pada masyarakat sekitar oleh karenanya perusahaan pada setiap tahun atau dalam beberapa tahun melakukan *assessment* atau kegiatan pemetaan sosial atas potensi dan masalah dalam masyarakat.

Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dan memiliki banyak sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit. Oleh karena itu Kalimantan merupakan salah satu daerah yang banyak dijadikan tempat kegiatan atau tempat didirikannya perusahaan-perusahaan multi nasional yang bergerak dalam pertambangan. Sayangnya, tingkat kesehatan di Kalimantan masih rendah dibanding daerah lainnya. Hal ini diikuti oleh masih minimnya infrastruktur di bidang kesehataan (Pusdatin Kemenkes RI, 2018).

Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 dinyatakan jumlah salah satu infrastruktur kesehatan yaitu Rumah Sakit di hampir seluruh provinsi di wilayah Kalimantan didominasi oleh Rumah Sakit milik swasta, hal ini menegaskan bahwa peran swasta atau perusahaan-perusahaan swasta memang memegang peranan penting untuk membantu pemerintah dalam membangun daerah-daerah yang belum dapat terjangkau atau tertangani.

Berbagai perusahaan telah melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya, beberapa perusahaan yang bergerak dalam infratraktur kesehatan di kepulauan Kalimantan yaitu:

- PT Astra Agro Lestari Tbk

Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan. Di dalam kegiatan tanggung jawab sosialnya, perusahaan ini memiliki beberapa fokus termasuk di dalam bidang kesehatan. PT Astra Agro Lestari memiliki kepedulian yang tinggi untuk kesehatan dari

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

para pekerja dan juga keluarga pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar.

Kesadaran akan kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai membuat perusahaan ini memiliki program kesehatan untuk ibu dan anak. Program dibentuk dengan membangun usaha kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola oleh masyarakat. Pembangunan pos pelayanan terpadu (posyandu) diberikan oleh perusahaan untuk memudahkan pelayanan kesehatan yang diharapkan menurunkan angka kematian pada proses kelahiran. Sampai saat ini tidak kurang dari 362 Posyandu telah didirikan oleh perusahaan dengan didukung oleh 2.174 kader terlatih untuk melayani 1.126 ibu hamil, 10.844 balita dan memberikan penyuluhan bagi 20.617 wanita usia subur. (PT Astra Agro Lestari Tbk, 2018)

Perusahaan juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan dari orang-orang rimba. Pada saat ini orang rimba masih banyak yang memilih menetap di dalam hutan. Oleh karenanya akses orang rimba terhadap kesehatan masih sangat minim oleh karena itu perusahaan telah menyediakan 1 unit mobil kesehatan untuk memfasilitasi Orang Rimba yang membutuhkan penanganan medis lebih cepat.

Bagi orang rimba yang telah keluar dan mulai menjalani hidup bersama masyarakat lain juga diberikan akses dengan melalui klinik kesehatan orang rimba yang tengah dalam masa adaptasinya. Sedangkan di bidang sanitasi juga perusahaan membuat sumber air bersih dan toilet untuk Sub Rombong Betaring serta Sikar.

- PT Pupuk Kalimantan Timur

PT Pupuk Kalimantan juga melakukan kegiatan CSR dalam bidang kesehatan. Di dalam kegiatan non infrastruktur, PT Pupuk melakukan pembinaan dan pendataan indeks keluarga sehat pada 1243 KK di daerah Guntung dan 814 di daerah Loktuan. Hal ini sebagai langkah preventif atau promotif.

Sedangkan untuk tanda kekurangan gizi yang terdeteksi maka akan ada pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk.

Dalam partisipasi infrastruktur, PT pupuk mendirikan posyandu lansia dan juga pemberian bantuan mobil imun untuk melakukan promosi kesehatan dan penanggulangan penyakit. Mobil ini akan berkeliling pada masyarakat dan memberikan pemeriksaan bergantian.

Bantuan Mobil Imun / Mobil Sehat PKT Pupuk Kaltim membantu pengadaan mobil sehat untuk promosi kesehatan dan penanggulangan penyakit dari dini agar penanganannya mudah dan kegiatan mobil sehat dilakukan keliling di RT bergantian dalam pemeriksaannya untuk masyarakat Guntung dan Loktuan (PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR, 2018).

- Tower Bersama Group

Perusahaan lainnya yang juga berkontribusi dalam infrastruktur kesehatan yaitu perusahaan Tower Bersama Group. Di dalam CSR yang dilakukannya, terdapat program "bangun sehat bersama". Didalam program ini, perusahaan memberikan mobil klinik (Monik) yang dilengkapi dengan perlengkapan medis dan tenaga dokter yang ikut berkeliling pada masyarakat.

Pelayanan yang dapat dilakukan dengan mobil keliling ini yaitu pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil (termasuk pelayanan Ultra Sound Scans/USG), balita, dan lansia. Monik TBIG juga melayani penyuluhan perilaku hidup higienis dan sehat, edukasi pencegahan penyakit, pemberian obat, dan makanan tambahan bagi balita. Program ini berjalan dengan kerjasama Rumah Zakat yang menargetkan kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan yang memadai. Mobil klinik ini juga berpartisipasi aktif di dalam kegiatan tanggap bencana untuk pengobatan dan logistik yang dikirimkan kepada korban-korban gempa dan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

banjir. (PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK , 2018).

Dampak CSR Pada Bidang Kesehatan

CSR sebagai suatu tanggung jawab perusahaan yang hadir dalam masyarakat tentu dirangkai untuk dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya. Seperti dapat dilihat untuk ketiga perusahaan yang sebelumnya telah disebutkan yaitu PT Astra, PT Pupuk, dan Tower Group. Ketiganya berpartisipasi yang mendorong peningkatan kesehatan kearah yang positif. Keterbatasan penanganan oleh pemerintah dapat sangat terbantu oleh hadirnya perusahaan-perusahaan ini melalui program CSR-nya.

Seperti pada PT. Astra, dengan perhatian pada orang rimba dan juga pada masyarakat sekitar maka PT Astra membantu masyarakat dalam bidang kesehatan dengan membangun klinik dan memberikan mobil keliling untuk membantu peningkatan fasilitas kesehatan pada warga sekitar. Hal ini meringankan masyarakat untuk lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan.

Terlebih PT. Astra memiliki kepedulian pada kondisi orang rimba dan mengevaluasi kegiatan setiap tahunnya untuk orang rimba. Hal ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengatasi masalah yang tengah dihadapi oleh orang rimba kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan sosial pada Orang Rimba yang bersifat jangka panjang sehingga tercapai kemandirian. Dengan tujuan akhir dari program ini adalah bahwa terdapat peningkatan akses Orang Rimba untuk mendapatkan sumber penghidupan, pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.

Kemudian PT. Pupuk juga telah memiliki indikator keberhasilannya yaitu Terlaksananya rencana kegiatan, Diperolehnya Indeks Keluarga Sehat yang bermanfaat untuk

perencanaan kegiatan ke depan, dapat dicapainya target nasional Indeks Keluarga Sehat, peningkatan upaya promosi kesehatan di wilayah Kelurahan Loktuan dan Guntung. Tersedianya fasilitas Pos Kesehatan Kelurahan Loktuan yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat (PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR, 2018). Jika indikator keberhasilan ini tercapai maka akan terjadi pula oeningkatan kesehatan dan angka harapan hidup di daerah Kalimantan pun akan menjadi meningkat. Hal yang sama pula akna terjadi jika perusahaan tower group semakin dapat melaksanakan mobil keliling yang dapat memberikan fasilitas kesehatan untuk daerah yang sulit mendapatkan akses. Hal ini dapat sangat membantu masyarakat untuk mengurangnya penyebaran penyakit, dan kelahiran bayi dan ibu yangs sehat di daerah Kalimantan.

Peran Pekerja Sosial Industri dalam Upaya CSR Terkait Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

Pekerja sosial industri secara umum dalam praktiknya memberikan pelayanan melalui bagian *Employee Assistance Program* (EAPs), *Human Resources Development* (HRD), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Pradini, Siti, & Irfan, 2015). Peran yang paling relevan dengan pembahasan artikel ini sehubungan dengan kontribusi perusahaan terkait pembangunan infrastruktur kesehatan di Kalimantan adalah pekerja sosial industri dalam ranah CSR. Pekerja sosial industri sendiri sudah mulai sedikit demi sedikit dikenal di dunia perindustrian Indonesia, khususnya untuk bagian CSR perusahaan di wilayah Kalimantan. Meskipun, belum semua CSR Perusahaan yang beroperasi memiliki pekerja sosial industri, melainkan menggunakan profesi lain untuk menjalankan fungsi CSR. Pekerja sosial industri memiliki beberapa peran dan fungsi yang dapat dijalankan di dalam CSR perusahaan, yakni peran advokasi sosial yang merupakan suatu bentuk pelayanan atau jasa pemberi pertolongan yang disediakan untuk memberdayakan masyarakat dengan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

membantu klien atau dalam konteks ini, masyarakat yang membutuhkan pertolongan supaya dapat memiliki akses terhadap sumber-sumber ataupun *stakeholder* terkait. Kemudian juga, pekerja sosial industri dapat menyusun kebijakan dan program-program yang sekiranya dapat memaksimalkan potensi ataupun menyelesaikan masalah yang terdapat di masyarakat sekitar perusahaan.

Hal ini sesuai jika dilihat dari setting PSI maka PSI dapat berperan sesuai dengan model yang ada dalam tanggung jawab sosial perusahaan yaitu di dalam unit CSR pekerja sosial dapat berperan mengidentifikasi dan membuat komitmen usaha peningkatan standar hidup untuk masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Pekerja sosial dapat berperan sebagai perencana dan analis kemasyarakatan, pengatur anggaran, pengembang program, beroker, pembela, dan negosiator.

Dalam pelaksanaannya, pekerja sosial tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Sehingga, dalam konteks pembangunan infrastruktur kesehatan, pekerja sosial perlu bekerja sama dengan profesi lain. Dalam proses pembangunan infrastruktur kesehatan tentunya diperlukan keterlibatan ahli di bidang kesehatan dan juga ahli pembangunan infrastruktur. Selain itu, pekerja sosial juga perlu memahami mengenai regulasi atau aturan-aturan yang berkaitan dengan izin pembangunan sarana dan prasarana. Namun, sebelumnya pekerja sosial perlu melakukan *assessment* untuk dapat memahami kondisi masyarakat sehingga pekerja sosial dapat mengetahui secara spesifik apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga fasilitas yang dibangun tidak hanya dibangun untuk memenuhi target jumlah pembangunan, tetapi dapat beroperasi dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk masyarakat tidak selalu dapat digunakan dengan efektif dan efisien karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu, selain meningkatkan kuantitas, kualitas juga perlu menjadi perhatian bagi penyedia fasilitas.

PENUTUP

Pembangunan infrastruktur kesehatan menjadi salah satu aspek krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, tetapi pihak diluar pemerintah juga dapat berkontribusi dalam upaya tersebut. Kontribusi dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta ini diperlukan untuk membantu mencapai target pembangunan infrastruktur yang masih sulit jika harus ditanggung pemerintah saja. Demi mencapai kesejahteraan dan maksimalisasi kualitas hidup masyarakat, berbagai jenis pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan, salah satunya di bidang kesehatan. Kalimantan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih memerlukan infrastruktur fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Secara umum, perusahaan memberikan kontribusi dan pengabdian terhadap masyarakat melalui kegiatan dan program CSR yang merupakan perwujudan dari bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar. Sudah terdapat beberapa contoh perwujudan kontribusi CSR perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan terhadap masyarakat sekitar. Namun, masih banyak ruang untuk peningkatan dan evaluasi mulai dari proses pengumpulan data dan informasi atau *assessment*, penyusunan program dan kebijakan, implementasi program dan kebijakan, sampai pemantauan hasil atau output dari program. Oleh karena itu, pekerja sosial industri sebagai salah satu profesi yang dapat berkontribusi di CSR perusahaan dapat menggunakan keterampilan dan wawasan yang dimiliki untuk dapat mewujudkan peran

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

dan fungsi CSR perusahaan tersebut dengan efektif dan efisien.

Program-program CSR dari perusahaan-perusahaan harus dipahami sebagai salah satu sumber potensial, sekaligus sebagai mitra bersama masyarakat dan pemerintah untuk membangun meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat. Kemitraan yang dibangun hendaklah tidak menciptakan ketergantungan atau ketidakmandirian dan melemahkan keberdayaan salah satu pihak. Pekerja sosial industri dapat membantu pola-pola relasi yang mendukung kemandirian, kemitraan sejajar, dan keberdayaan, dengan bahasa lain adalah keberfungsian sosial, dari dari masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. Y., Rachim, H. A., & Zaenuddin, M. (2015). Peran Pekerja Sosial di Perindustrian Indonesia. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 301-444.
- Aryawan, M., Rahyuda, I. K., & Ekawati, N. W. (2017). Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Ekonomi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan . *Manajemen Unud*, 604-633.
- Asyari, H. (2009). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont. *Tesis*. Semarang.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lestari, E. P., Riyanto, & Adiono, R. (n.d.). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik Vol. 3*, 800-806.
- Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat . *JESP*.
- Mildiana, H. (2012, Agustus 6). *Berau Coal Jalankan Paradigma Baru Program CSR*. Retrieved from AntaraKaltim: <https://kaltim.antaranews.com/berita/8574/berau-coal-jalankan-paradigma-baru-program-csr>
- Murni, S., Amin, & Jamal, N. F. (2015). Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu . *Administrative Reform*.
- Pohan, M., & Halim, R. (2013). Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan dan Aksesibilitas terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk di Provinsi Sumatera Utara. 77-91.
- Pradini, D. D., Siti, D. H., & Irfan, M. (2015). Peran Pekerja Sosial dalam Dunia Industri di Indonesia. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 147-300.
- PT Astra Agro Lestari Tbk. (2018). *Laporan Keberlanjutan 2018* . Kalimantan: PT Astra Agro Lestari Tbk .
- PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR. (2018). *Laporan keberlanjutan 2018*. Bontang : PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR.
- PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK . (2018). *ANNUAL REPORT 2018* . Jakarta: PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK .
- Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Data dan Informasi Profil-Kesehatan Indonesia, Pusdatin Kemenkes RI (2018).
- Putri, S. W. (2019, November 12). *Hari Kesehatan Nasional: Persebaran*

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------

- Fasilitas Kesehatan Indonesia Tidak Merata*. Retrieved from AyoBandung.com:
<https://www.ayobandung.com/read/2019/11/12/69934/hari-kesehatan-nasional-persebaran-fasilitas-kesehatan-indonesia-tidak-merata>
- Raharjo, ST. (2019). CSR, Relasi Industri dengan Masyarakat Sekitar, Edisi Revisi. Bandung: Penerbit ITB
- Rioja, F. K. (2001). Growth, Welfare, and Public Infrastructure:. *Journal of Economic Development*, 119-129.
- Risa, N., Sulastri, T., & Pramono, J. (2011). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN KEPADA MASYARAKAT STUDI KASUS PADA PT GOLD COIN SPECIALITIES . *JRAK*, 73-83.
- Rosyida, I., & Nasdian, F. T. (2011). PARTISIPASI MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KOMUNITAS PERDESAAN . *Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 51-70.
- Safira, Djohan, S., & Nurjanana. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 211-216.
- Sheehy, B. (2012). Understanding CSR: An Empirical Study of Private Regulation. *Monash University Law Review*, 103-127.
- Suharto, E. (2006). *Pekerjaan Sosial di dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *CSR & COMDEV :Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tribunnews.com. (2018, Mei 8). *Fasilitas Kesehatan Belum Memadai Warga Perbatasan Berobat ke Malaysia*. Retrieved from Tribunnews.com:
<https://www.tribunnews.com/regional/2018/05/08/fasilitas-kesehatan-belum-memadai-warga-perbatasan-berobat-ke-malaysia?page=3>
- Wibhawa, B., Raharjo, S. T., & S., M. B. (2019), Edisi Revisi. *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Penerbit ITB.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 1	Hal: 187 - 198	April 2020
---	--	--------------	----------------	------------